BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung, selain dikenal sebagai identitas dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, juga dikenal sebagai kota wisata yang tidak pernah terlepas dengan berbagai aktivitas serta tingkat interaksi antar satu individu dengan individu yang cukup tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pendatang setiap tahunnya, baik untuk berwisata di tempat wisata yang ada di Kota Bandung maupun melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja. Mengingat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di Kota Bandung, oleh karenanya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung serta memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, dalam hal ini adalah fasilitas publik.

Menurut pandangan Subroto (dalam Sam, 2008), fasilitas merupakan segala sesuatu yang berbentuk benda ataupun uang yang bertujuan dapat mempermudah atau memberi kelancaran pada suatu usaha. Dalam hal ini, fasilitas publik merupakan salah satu bagian dari fasilitas yang diharapkan dapat mempermudah kegiatan manusia. Fasilitas publik di ruang terbuka merupakan salah satu dari bentuk fasilitas publik yang paling mudah dijangkau dan dinikmati oleh masyarakat. Setiap fasilitas publik mempunyai peran dan fungsinya masing-masing yang tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Namun setiap fasilitas publik seringkali mempunyai permasalahan tersendiri, baik dari segi kelayakan maupun segi efisiensi yang tentu saja mempunyai dampak terhadap masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna fasilitas publik. Oleh karena itu, setiap upaya meningkatkan daya fungsi fasilitas publik disertai dengan kebijakan yang jelas, konkrit dan tepat sasaran.

Secara umum, fasilitas publik merupakan salah satu bentuk hak-hak warga negara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Isi pasal tersebut menegaskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh fasilitas pelayanan

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

umum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan selayak-layaknya, baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, penyediaan fasilitas publik yang baik merupakan bentuk tanggung jawab negara bahwa hak warga negara untuk memperoleh rasa aman haruslah dipenuhi oleh penyelenggara negara. Memberikan rasa aman kepada warga negara sendiri merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia dan negara telah diamanatkan sebagaimana dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh darah tumpah darah Indonesia. Amanat tersebut diturunkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Bagian Keenam tentang Hak atas Rasa Aman. Kemudian, diatur juga dalam pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara yuridis, kedua undang-undang tersebut secara tidak langsung menjadi pijakan bahwa dengan memberikan fasilitas publik dan layak khususnya di jalan raya secara tidak langsung telah menjamin keselamatan publik dalam menjalankan aktivitasnya, terutama bagi pejalan kaki yang berinteraksi langsung terhadap fasilitas publik yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, fasilitas publik memiliki peran yang vital dalam masyarakat karena dapat menunjang setiap aktivitas masyarakat didalamnya dan oleh karenanya pemerintah harus menjamin penuh ketersediaan dan kesiapan dari setiap fasilitas publik yang ada. Hal itu pula disampaikan oleh Harjanti dan Aulianingtyas (2020, hlm 36) bahwa fasilitas publik merupakan bagian dari unsur penting dalam membentuk keruangan suatu daerah, karena fasilitas publik merupakan sebuah komponen yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berjalan kaki merupakan suatu aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia baik itu disekitar pedesaan maupun perkotaan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa nyaman melakukan aktivitas tersebut tanpa ada rasa was-was ataupun merasa terancam dalam kegiatan berjalan kaki. Salah satu bentuk aktivitas berjalan kaki yang dilakukan adalah kegiatan menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain baik menyebrang

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melewati jalan yang tergolong sempit maupun tergolong luas. Mengenai pejalan kaki sendiri diatur juga dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan bahwa:

“Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Artinya, secara yuridis pejalan kaki juga diatur dalam hal ini sebagai subjek yang mempunyai hak untuk menikmati akses di ruang lalu lintas jalan dan mempunyai hak untuk diproteksi oleh negara dengan memberikan fasilitas publik yang layak dan terjangkau.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh fasilitas publik dan negara wajib memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu, negara harus memiliki strategi dan upaya bagi masyarakatnya agar terpenuhi segala hak-hak yang wajib dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat termasuk dalam hal ini menyediakan fasilitas publik yang tentu saja harus layak, efisien, dan dapat digunakan oleh siapapun. Menurut Rita (2016, hlm. 175) pemerintah secara hakikat memiliki tugas yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dasar hukum mengenai Pelayanan Publik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Jika kita lihat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, didalamnya menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana menjamin hak-hak yang wajib dilindungi oleh pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas yang dapat melindungi kegiatan pejalan kaki dengan layak dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jika perlindungan bagi pejalan kaki itu diterapkan dengan baik maka akan tercipta lingkungan perkotaan yang manusiawi. Lingkungan perkotaan yang manusiawi adalah lingkungan perkotaan yang ramah bagi pejalan kaki yang tentu dalam ukuran berdasarkan skala manusia (Nasution, 2006, hlm. 54). Diperlukan perlindungan bagi pejalan kaki karena posisi pejalan kaki sendiri merupakan salah satu unsur terlemah bila mereka berada di dalam satu ruang lalu lintas (Sari, Efranto, dan Cahyawati, 2016, hlm. 142). Selain itu, apabila pemangku kebijakan telah menyediakan fasilitas yang layak bagi

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat khususnya masyarakat maka secara tidak langsung pemangku kebijakan telah menunaikan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan keamanan bagi masyarakatnya. Hal ini sependapat oleh Darmawan (2015, hlm. 807) bahwa Tanggung jawab secara subjektif berakar pada sifat aparat sebagai subjek individu (pengendalian internal) yang menekankan nilai-nilai etika dan kemanusiaan, yang meliputi kesetaraan, kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administratif lainnya.

Pemerintah Kota Bandung memiliki strategi tersendiri agar fasilitas publik yang ada di Kota Bandung dapat nilai fungsi, dan efisiensi dapat meningkat serta bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak bagi warga negara. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam hal tersebut adalah pemberlakuan *Pelican Crossing* di beberapa ruas jalan di Kota Bandung seperti di Jalan Wastukencana (samping dan depan Balaikota Bandung), diruas Jalan Asia Afrika, belakang Kantor Balaikota Bandung (Jalan Aceh), kawasan Jalan Naripan, kawasan Jalan Tamblong, dan sebelah timur kawasan Masjid Raya Bandung. Pemberlakuan sistem penyeberangan tersebut dimulai pada November 2016 yang diharapkan dapat menarik perhatian kepada masyarakat khususnya pejalan kaki disekitar penyeberangan tersebut. Efektivitas penggunaan fasilitas ini dianggap memiliki manfaat yang signifikan terutama bagi masyarakat yang bagi sebagian orang merasa kesulitan dalam menyeberang di jalan raya dan memberikan perhatian kepada pengendara di jalan untuk memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang agar kecelakaan terhadap pejalan kaki dapat dihindari.

Kota Bandung sendiri memiliki tingkat populasi penduduk sebanyak 2.497.938 jiwa, dengan luas wilayah mencapai 167,31 km³ serta jumlah potensi korban kematian dikarenakan kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.881.498 unit (BPS Kota Bandung, 2018). Seiring dengan data statistik tersebut, peluang untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas juga cukup tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sugiyanto, dkk (dalam Sugiyanto dan Santi, 2015, hlm. 66) bahwa faktor utama dari tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas adalah seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan motor. Menurut WHO (2015), kecelakaan lalu lintas merupakan 1 dari 10 besar penyebab kematian terbesar di

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seluruh dunia. Selain itu, menurut Kapolda Jawa Barat yang dilansir pada laman *akurat.co* (Putra, 2019) mengatakan bahwa jumlah kecelakaan pada tahun 2019 tercatat 6.897 kejadian dengan rincian pada tabel 1.1. sebagai berikut:

No.	Jenis Kejadian	Tahun	
		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meninggal Dunia	3.392	3.250
2.	Luka Berat	1.010	856
3.	Luka Ringan	7.001	7.239
4.	Jumlah Laka Lantas	7.217	6.897
5.	Kerugian Materi (Rp.)	13.159.580.400	16.785.588.502

Sumber: (Polda Jawa Barat, 2019)

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018-2019 di Jawa Barat

Setidaknya, pejalan kaki merupakan satu dari tiga kelompok yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh James, dkk (2011, hlm. 130), diantara tiga kelompok tersebut yang paling sering menjadi korban adalah pejalan kaki, meskipun jumlah pejalan kaki berbeda-beda di setiap negaranya.

Dengan dimulainya penerapan *Pelican Crossing* yang dimulai sejak akhir 2016 di sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Seharusnya terdapat evaluasi yang perlu diperhatikan serta diimplementasikan kedepannya. Salah satu yang harus diperhatikan adalah seberapa tinggi partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut khususnya kepada penyeberang di sekitar *Pelican Crossing* tersebut. Menurut Sutoro Eko (Triputro dan Supardal, 2005, hal 176), partisipasi masyarakat adalah subjek utama dalam upaya melakukan pemberdayaan, dalam hal ini partisipasi berkaitan dengan tiga hal yakni kebijakan; substansi partisipasi (suara, akses, dan kontrol warga masyarakat), dan kegiatan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat.

Secara umum konsep mengenai jaminan hak atas rasa aman warga negara oleh pemerintah memiliki erat kaitannya dengan penerapan demokrasi. Dalam hal ini, terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak warga negara merupakan indikator dari pemerintahan tersebut telah menegakkan demokrasi dengan baik. Hal itu pula yang disampaikan oleh Thohari (2014, hlm 27) bahwa, salah satu bentuk alat ukur demokrasi bagi sebuah pemerintahan adalah negara tersebut mampu memenuhi

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

serta menjamin hak-hak warga negaranya. Namun, dalam hal ini masyarakat juga seyogyanya wajib untuk berpartisipasi terhadap setiap aturan ataupun kebijakan yang memiliki dampak positif yang besar agar dapat merasakan bahwa kebijakan atau aturan tersebut memberikan pengaruh yang positif bagi individu lainnya. Hal ini juga senada dikemukakan oleh Rosana (2016, hlm. 50) bahwa, hubungan antara negara dengan masyarakat dapat digambarkan dengan penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara dalam bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan seperangkat kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat.

Selama penerapan *Pelican Crossing* di Kota Bandung ini tentu dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan lalu lintas. Namun dalam prakteknya, masih menyisakan persoalan dalam hal memberikan dampak yang belum secara signifikan bagi masyarakat luas. Padahal dengan diterapkannya *Pelican Crossing* ini seharusnya dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dan juga berkelanjutan. Kurangnya kesadaran akan keselamatan bagi diri sendiri menjadi faktor yang mendominasi terhadap permasalahan ini sehingga fasilitas publik ini belum bisa digunakan dengan maksimal. Tentu saja ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tentunya tidak berarti apa-apa jika partisipasi dari masyarakat tersebut kurang bahkan cenderung abai terhadap kebijakan tersebut. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang menerobos rambu-rambu *Pelican Crossing* disaat ada penyebrang yang sedang menggunakan fasilitas tersebut dan masih banyak pejalan kaki yang tidak memanfaatkan *Pelican Crossing* saat menyeberang merupakan salah satu permasalahan yang ditemui dalam implementasi penerapan fasilitas *Pelican Crossing* di Kota Bandung.

Di era digital saat ini, semua aktivitas manusia secara tidak langsung terpengaruh dengan pesatnya perkembangan teknologi yang kian hari kian meningkat efektivitasnya, tidak terkecuali dalam bidang fasilitas publik sendiri. Dengan adanya inovasi di bidang fasilitas publik sendiri diharapkan dapat meningkatkan nilai efisien, nilai kelayakan dan semakin memudahkan bagi masyarakat dalam pemanfaatannya. Dalam hal ini, dapat membantu masyarakat khususnya bagi pejalan kaki karena banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang sudah terintegrasi dengan teknologi sehingga dalam upaya memberikan hak-hak

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagi pejalan kaki memberi dampak yang besar, baik itu dari segi kemudahan, efisiensi, kelayakan dan semakin terjangkau bagi semua kalangan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa penerapan *Pelican Crossing* di beberapa kota khususnya Kota Bandung dapat memberikan manfaat yang sangat terasa khususnya bagi penggunanya, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di muka umum khususnya di jalan raya. Sebelumnya, masyarakat kurang peduli akan kepedulian seputar keselamatan di ruang publik (dalam hal ini di jalan raya). Kemudian seiring dengan mulai diterapkannya *Pelican Crossing*, masyarakat secara berangsur mulai memanfaatkan fasilitas tersebut dan tumbuhnya kesadaran bahwa dalam ruang publik pun masyarakat harus sadar akan keselamatan dalam ruang publik khususnya di jalan raya sebagaimana bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara salah satunya adalah hak rasa aman. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengamatan Departemen Lingkungan London bahwa penggantian *Zebra Crossing* menjadi *Pelican Crossing* dapat menunjukkan pengurangan yang cukup berarti terhadap angka kecelakaan lalu lintas bahkan hingga 60% (Lalani dalam Mulyadi, 2016, hlm. 10). Selain itu, menurut Annisya, (2017, hlm. 6) mengatakan bahwa kunci utama dari pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah terlihatnya kesukarelaan masyarakat untuk terlibat atau turut serta dalam kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya konsep partisipasi ini juga tidak bisa terlepas dengan konsep elemen dasar kewarganegaraan dalam artian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dalam suatu wilayah, bahkan dalam bidang lalu lintas sekalipun. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Marschall (2004, hlm. 232) bahwa “*the purpose of citizen participation is as much to communicate preferences and influence policymaking as to assist in the implementation of the public good and to contribute to its preservation and continuation*” (partisipasi warga negara dibutuhkan untuk mengkomunikasikan aspirasi, mempengaruhi pembuatan kebijakan, membantu pelaksanaan pengadaan untuk publik, dan memberi kontribusi pada upaya pelestarian secara berkelanjutan).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam mengimplementasi serta mengevaluasi setiap

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan pemerintah memiliki peluang yang besar untuk memengaruhi setiap perkembangan dari kebijakan yang diambil lembaga publik agar semakin lebih baik. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap seberapa efektif kebijakan tersebut diberlakukan di masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan Arnstein (1969, hlm. 217) bahwa tiga tangga teratas tingkatan Partisipasi Masyarakat yakni kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) serta pengawasan masyarakat (*citizen control*) sangat mungkin memiliki wewenang penuh untuk mengelola serta mengontrol kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Laily (2015, hlm. 300) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari komunikasi dua arah antar pemerintah yang berperan sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat yang berperan sebagai pihak yang merasakan langsung dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan efektivitas dari penerapan *Pelican Crossing* dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman. Hal tersebut penting untuk dikaji dengan pendekatan perspektif pendidikan kewarganegaraan agar dapat diimplementasikan secara lebih mendalam pada elemen masyarakat, sekolah, maupun akademisi serta sumbangsih keilmuan dalam proses pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka latar belakang tersebut menjadi fondasi awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “**Efektivitas Penerapan Pelican Crossing Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Ditinjau Dari Perspektif Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Pada Ruas Jalan Asia Afrika Kota Bandung)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian agar kajian dan pembahasan lebih terarah. Adapun rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan penerapan *Pelican Crossing* di Kota Bandung?
- b. Bagaimana implementasi dari penerapan *Pelican Crossing* terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung?

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Bagaimana efektivitas dari penerapan *Pelican Crossing* terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung?
- d. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan *Pelican Crossing* terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah menemukan variabel (indikator) penelitian mengenai efektivitas penerapan *Pelican Crossing* yang ada di Kota Bandung ini maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *Pelican Crossing* serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga negara dengan meninjau perspektif kewarganegaraan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi di lapangan dalam penerapan *Pelican Crossing* di Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui indikator-indikator yang dijadikan standar dalam pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga negara.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam implementasi penerapan *Pelican Crossing* bagi masyarakat Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- d. Untuk mengetahui efektivitas dari penerapan *Pelican Crossing* dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung.
- e. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dari penerapan *Pelican Crossing* sebagai upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Segi Teoritis

Juang Pratama Abdi, 2021
EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Memberikan sumbangsih terhadap khazahah ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak warga negara dalam hal ini adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia.
2. Memberikan kontribusi terhadap ilmu dan pengetahuan terkait teori kebijakan publik
3. Memperluas kajian yang berkaitan dengan penerapan *Pelican Crossing* khususnya di Kota Bandung.

1.4.2 Segi Praktis

a. Dinas Perhubungan Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penerapan *Pelican Crossing* di sejumlah ruas jalan Kota Bandung agar lebih efektif dan terarah. Serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapannya.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam berbagai bidang di kehidupan bermasyarakat khususnya dalam keselamatan diri sendiri jika berada di wilayah publik.

c. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta pembelajaran bagi mahasiswa agar menambah khazanah dan sudut pandang terhadap keilmuan yang ada sebagaimana berkembangnya keilmuan mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, pemerintahan serta implementasi dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga publik.

d. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris bagi penulis mengenai proses perumusan, implementasi serta evaluasi dari kebijakan yang dibuat oleh lembaga publik serta sebagai sarana tambahan pengembangan keilmuan mengenai Kebijakan Publik bagi pemerintahan.

1.4.3 Segi Kebijakan

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perhatian kepada pihak terkait terhadap kebijakan penerapan *Pelican Crossing* seperti:

1. Jika kebijakan ini berhasil untuk diterapkan, maka perlu dilakukan konsistensi terhadap kualitas dari penerapan kebijakan ini;
2. Bagi pihak terkait harus mengukur keberhasilan kebijakan ini secara berkala agar tujuan dan indikator yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik; dan
3. Jika kebijakan ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat khususnya pengguna *Pelican Crossing* diharapkan dapat memperbanyak atau mempertahankan kuantitas dan kualitas dari penerapan fasilitas *Pelican Crossing* di Kota Bandung.

1.4.4 Segi Isu Aksi Sosial

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perhatian kepada segenap lapisan terhadap kebijakan penerapan *Pelican Crossing* seperti:

- a. Dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan menikmati kebijakan penerapan fasilitas *Pelican Crossing* dengan sebaik-baiknya;
- b. Meningkatnya Partisipasi masyarakat untuk terus mengawal setiap kebijakan yang diterapkan di Kota Bandung khususnya program penerapan fasilitas *Pelican Crossing* ini;
- c. Menumbuhkan kontribusi dari setiap masyarakat untuk terus mensosialisasikan fasilitas ini agar dapat diketahui secara luas dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya; dan
- d. Memperkuat kolaborasi dan sinergitas antar masyarakat dengan pemangku kebijakan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

1.5. Sistematika Organisasi Skripsi

Sistematika organisasi merupakan bagian yang berisi sebuah rincian penulisan skripsi dari masing-masing bab yang diberi penjelasan mengenai bahasan di setiap bab nya. Adapun sistematika organisasi dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti, selain itu, didalam bab ini juga menyajikan rumusan masalah dari penelitian ini agar penelitian dapat terfokus serta terarah arah kajiannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.
- 2) Bab II Kajian Teori. Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung arah kajian penelitian, penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.
- 3) Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang berhubungan dengan langkah yang ditempuh peneliti sehingga pada tahap akhir penelitian dapat menghasilkan penelitian yang akurat, valid dan relevan.
- 4) Bab IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan mengenai hasil temuan penelitian dan pembahasan akan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- 5) Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini berisi ringkasan dari sebuah hasil penelitian yang dilengkapi dengan pemberian implikasi dan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait.